

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) X KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**Dian Saputra**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru  
saputradian@eco.uir.ac.id

---

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui BUMDes X apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif menelaah dan membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang berkaitan dan disajikan dalam bentuk penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan bahwa terdapat masalah-masalah didalamnya, dapat disimpulkan bahwa BUMDes X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

**Kata Kunci:** Akuntansi, Proses Akuntansi, BUMDes

### ABSTRACT

*This research was conducted at Village Owned Enterprises (BUMDes) X Kelayang District, Indragiri Hulu Regency. This study aims to determine whether BUMDes X is following generally accepted accounting principles. This study uses a descriptive method to examine and compare the data that has been collected with related theories and is presented in the form of the research. Based on the research and discussion that has been done that there are problems in it, it can be concluded that BUMDes X Kelayang District, Indragiri Hulu Regency is not following generally accepted accounting principles.*

**Keywords:** Accounting, Accounting Process, BUMDes

---

### PENDAHULUAN

Di Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang ditempati oleh masyarakat. Pulau tersebut terdiri dari pusat kota, kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya. Dalam kecamatan tersebut, terdapat salah satunya yaitu desa. Setiap desa sangat berperan penting dalam melihat bagaimana perkembangan dari masyarakat setempat. Hal terkecil yang dapat dilihat dari kemajuan desa tersebut adalah bagaimana desa dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Desa sebagai salah satu struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis bahkan sosiologis karena desa memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Pengertian desa menurut Sululing, (2018) adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada didaerah kabupaten yang mempunyai keanekaragaman, otonomi asli,

demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam desa memiliki organisasi yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari desa tersebut. Salah satu organisasi tersebut yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) awalnya dikenal dengan nama Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat desa dan ingin memajukan serta mensejahterakan dari masyarakat desa itu sendiri. Di Desa Kecamatan Kelayang menjadi salah satu pusat pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED-SP). Namun, Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X. Modal Usaha ini berasal dari Bantuan Pemerintah Kab. Indragiri Hulu sebesar Rp 500.000.000. Dari modal tersebut ada juga modal dari simpanan pokok, administrasi dan pinjaman dari pihak ketiga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X bergerak dibidang ekonomi desa simpan pinjam dan perkebunan. Lembaga ini sebagai wadah dalam mengurus usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian desa. Badan usaha ini bergerak juga dibidang perkebunan. Namun, beberapa tahun berjalan perkebunan tersebut terhenti pengelolannya karena terkendala dibiaya dan pengurusannya yang sudah hampir tidak berjalan lagi. Jadi, perkebunan untuk beberapa tahun sekarang tidak berjalan dan kegiatan simpan pinjam yang masih aktif.

Seiring meningkatnya dan keberagaman kebutuhan masyarakat maka BUMDes dituntut untuk memenuhi serta melayani berbagai jenis usaha masyarakat desa dan BUMDes harus mampu bersaing dengan lembaga

pembiayaan lain. Oleh karena itu, desa tersebut dituntut lebih baik lagi dalam pengelolaan dan penerapannya agar tercapai kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan yang dimaksud adalah suatu kemampuan dalam menggerakkan semua sumber biaya organisasi seperti keuangan, personalia, inovasi, integritas, akuntabilitas, transparansi dan pelanggan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menyediakan informasi berupa posisi keuangan, kinerja dan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan kinerja atas semua yang sudah diamanatkan kepadanya. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengikuti Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum dan disusun berdasarkan SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) tahun 2013 yang akan menyajikan informasi menjadi lebih mudah dipahami, relevansi, keandalan, substansi, memiliki kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Sebaliknya jika laporan tersebut tidak disusun berdasarkan prinsip dan standar yang berlaku akan dapat menyesatkan dalam penggunaan informasi dan pengambilan keputusan.

Kegiatan BUMDes sangat diperlukan laporan keuangan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi tersebut. Dalam mengelola BUMDes, para pengelola membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang sudah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang sudah dibuat dan disusun dapat memberikan informasi bagi pihak internal maupun eksternal yang bersangkutan. Akuntansi dapat dijadikan dasar dan alat dalam memberikan

informasi untuk pengambilan keputusan baik dimasa sekarang ataupun masa mendatang serta dapat mengembangkan suatu organisasi yang dikelola.

Organisasi usaha harus  
membuat laporan keuangan  
sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah dilakukan. Dalam membuat laporan kinerja keuangan tersebut peneliti memilih objek penelitian pada suatu usaha desa di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes X untuk melihat transparansi dan membandingkan antara data yang diperoleh dengan fakta yang terjadi dalam kegiatan pelaporan kinerja keuangan usaha dalam desa. Peneliti memilih BUMDes X karena peneliti melihat perkembangan yang cukup pesat dalam suatu usaha desa tersebut. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes X yang sudah mulai berkembang yang memiliki bantuan anggaran dari pemerintah untuk membuat suatu bisnis usaha agar masyarakat desa tersebut dapat lebih maju lagi dan sejahtera.

Sistem pencatatan yang dilakukan oleh BUMDes adalah sistem pencatatan yang berbasis akrual yaitu jenis pencatatan yang dilakukan ketika terjadinya transaksi. Pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan pada BUMDes X menggunakan metode *accrual basis*, dimana mencatat setiap transaksi yang terjadi berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat transaksi terjadi dan telah diterima. Pengakuan beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kas telah dibayarkan.

Langkah pertama yang dilakukan dalam pencatatan akutansi BUMDes

adalah mulai mengumpulkan dan menganalisis semua bukti transaksi-transaksi seperti kwitansi. Bagian yang bertugas dalam keuangan BUMDes akan mencatat transaksi-transaksi kedalam buku kas umum dan buku kas manual SP, sedangkan transaksi yang tidak tunai akan dicatat ke dalam buku memorial, berdasarkan hasil catatan pengelola akan merekap semua daftar uang masuk dan daftar uang keluar.

Dalam penyajian neraca BUMDes X terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Masalah yang ditemukan dalam BUMDes X adalah pihak BUMDes tidak menghitung penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah piutang pada tahun 2018 sebesar Rp 531.817.000 dan tahun 2019 sebesar Rp348.272.000. Setiap piutang memiliki resiko tidak tertagih dan dapat menyebabkan kerugian. Untuk mengetahui seberapa resiko yang dimiliki, pihak BUMDes dianggap perlu menghitung penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang usaha yang tidak dibayar oleh pemanfaat (nasabah). Tujuan menghitung penyisihan piutang tak tertagih tersebut, agar dapat mengetahui seberapa besar nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.

Pada bagian aset tetap di neraca pada tahun 2018 sebesar Rp 101.013.00 dan 2019 sebesar Rp 101.095.000 yaitu pihak BUMDes tidak menghitung penyusutan terhadap aset selama tahun berjalan. Akibatnya, jika BUMDes X tidak menghitung penyusutan maka penyajian aset tetap pada neraca tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Aset yang disajikan oleh pihak BUMDes, ada beberapa yang seharusnya bukan termasuk ke dalam aset.

Pada penyajian neraca terdapat perkiraan utang simpanan pokok yang merupakan dana yang diperoleh dari

simpanan wajib nasabah. Pada tahun 2018 terdapat utang simpanan pokok sebesar Rp 13.679.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 22.461.000. Utang nasabah lama merupakan ada dana yang dipinjam oleh pihak BUMDes Sepakat pada tahun 2018 sebesar Rp 267.391.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 100.567.000.

Modal awal neraca pada tahun 2018 sebesar Rp 202.446.400 dan modal bantuan bergulir pemerintah desa sebesar Rp 142.367.600, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 267.391.000 dan bantuan bergulir pemerintah desa sebesar Rp 128.727.824. Modal awal adalah modal pangkal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari tabungan masyarakat. Bantuan bergulir pemerintah desa merupakan dana keuntungan yang disisihkan dari kegiatan program atau proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat selama beberapa tahun berjalan.

Pihak BUMDes X juga menyajikan laporan laba rugi. Laporan laba rugi disusun oleh pihak pengelola terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan terdiri dari jasa pinjaman, pendapatan provisi/lain dan bunga bank sedangkan beban terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Pendapatan provisi/lain merupakan dana yang diterima dari pemerintah untuk membantu keuangan BUMDes Sepakat Sejahtera dalam satu periode. Masalah yang ditemukan jumlah jasa pinjaman pada tahun 2019 tidak ada perubahan dari tahun 2018 dan akun pendapatan provisi/lain terdapat kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, laporan yang disajikan belum memberikan informasi keuangan yang lengkap dan akurat.

Pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini belum menyajikan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan keuangan yang baik. Akibatnya, informasi yang diberikan

kurang tepat untuk memprediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian dimasa depan serta tidak dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari kekayaan dalam periode tertentu.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada permasalahan diatas, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi penerapan akuntansi pada BUMDes X dengan mengangkat judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.**

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Sistem Pencatatan dan Dasar Akuntansi**

Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan dari setiap transaksi dalam ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau lembaga. Pengertian pengidentifikasian Halim, (2014: 44) adalah pengidentifikasian terhadap transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi atau tidak (aktiitas yang berhubungan dengan uang). Selanjutnya adalah proses pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan uang sebagai satuannya. Proses selanjutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu merupakan pengolahan data transaksi ekonomi yang melalui penambahan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Dari semua tahapan proses yang sudah dilakukan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang menjadi hasil akhir dari proses akuntansi. Ada beberapa macam dari sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam melakukan proses pencatatan, yaitu sebagai berikut :

### 1. *Single Entry*

Sistem pencatatan ini sering juga disebut dengan sistem buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan akan dilakukan sebanyak satu kali saja. Kelebihan dari sistem pencatatan *single entry* adalah pencatatan yang dilakukan sederhana dan mudah untuk dipahami. Kekurangannya yaitu pencatatan ini kurang bagus atau baik untuk pelaporan, sulit menemukan kesalahan yang terjadi pada pembukuan, dan sulit untuk dikontrol.

### 2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Transaksi akan dilakukan pencatatan sebanyak dua kali. Dalam Pencatatan *double entry* dikenal dengan istilah menjurnal yang dimana kita harus menjaga kesinambungan dari persamaan dasar akuntansi tersebut.

### 3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan yang ketiga adalah *single entry* yang merupakan pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan *double entry*, ditambah dengan pencatatan di buku anggaran.

Sistem pencatatan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Semua sistem pencatatan memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri, tergantung sistem mana yang fleksibel dan efisien untuk digunakan.

## Prinsip Akuntansi

Dalam mengaplikasikan akuntansi membutuhkan adanya suatu pedoman tertentu yang dapat menjadi acuan.

Pedoman tersebut adalah sebuah konsep, standar dan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi haruslah dapat diterima umum. Prinsip akuntansi menurut Bahri, (2016: 3) adalah sebagai berikut :

1. Kontinuitas usaha (*going concern*) adalah suatu kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus mengalami kelanjutan atau akan berlanjut dan tidak terjadi likuidasi dimasa mendatang.
2. Kesatuan usaha (*business entity*). Konsep ini berkonsep bahwa perusahaan atau lembaga dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya.
3. Periode akuntansi (*accounting periode*) merupakan kegiatan perusahaan atau lembaga yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan disusun per periode pelaporan.
4. Kesatuan pengukuran (*measures unit*). Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang telah terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang atau satuan uang yang digunakan adalah dari negara tempat perusahaan itu berdiri).
5. Bukti yang objektif (*objective evidences*). Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi yang diterima dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang sudah ada.
6. Pengungkapan sepenuhnya (*full disclosure*). Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang

berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai.

7. Konsistensi (*consistency*). Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari awal periode ke periode selanjutnya yang lain agar laporan keuangan yang dibuat dapat dibandingkan.
8. Realisasi (*matching expense with revenue*). Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui seberapa besar dari laba-rugi yang dihasilkan setiap periode berjalan.

#### **Siklus Akutansi**

Siklus akutansi menurut Bahri, (2016: 18) adalah langkah atau tahapan yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan agar siap untuk pencatatan selanjutnya.

Pengertian siklus akutansi menurut Halim , (2014: 56) merupakan bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa siklus akutansi merupakan sebuah proses atau tahapan dimulai dari adanya bukti-bukti dari transaksi itu lalu dicatat, bagaimana munculnya akun-akun pada jurnal hingga disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Tahaptahap dalam siklus akutansi menurut Halim , (2014: 57) meliputi:

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam buku dan melakukan analisis terhadap keuangan.

2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini dikenal dengan menjurnal.
3. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. proses ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to-date (pemuktahiran).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah Penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun buku besar
8. Menentukan saldo-saldo dari buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

#### **Sistem Akutansi Piutang**

Sistem akutansi piutang sangat mempengaruhi karena sebagai pengendalian internal dalam pencatatan piutang yang baik. Prosedur pencatatan piutang dilakukan untuk tujuan mencatat perpindahan piutang perusahaan kepada setiap debitur. Menurut Mulyadi, (2018: 207) mengemukakan informasi piutang yang diperlukan oleh pihak manajemen adalah sebagai berikut :

1. Saldo piutang pada saat periode tertentu kepada debitur.
2. Riwayat pelunasan piutang yang diperlukan.
3. Umur piutang setiap debitur pada periode tertentu

Dengan mengirimkan secara periodik pernyataan piutang, catatan piutang perusahaan dapat diuji keakuratannya dengan tanggapan yang diterima dari debitur atas pengiriman

pernyataan piutang yang ada. Pengiriman pernyataan yang baik dapat menimbulkan citra yang baik pula dimata debitur mengenai keandalan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Untuk mengetahui keadaan piutang dan kemungkinan tertagih dan tidak tertagihnya piutang tersebut, secara periodik fungsi pencatatan piutang harus menyajikan informasi berupa umur piutang. Piutang secara umum dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Piutang usaha adalah tagihan kepada debitur yang melakukan transaksi secara kredit atau tidak tunai. Biasanya perusahaan atau organisasi akan mengharapkan menerima kas dari transaksi tersebut dalam waktu 30-60 hari.
2. Piutang wesel adalah tagihan yang diukur dengan instrumen formal sebagai bukti tagihan yang sering dikenal dengan surat riset. Piutang wesel memiliki jangka waktu pelunasan lebih panjang dari piutang usaha, yaitu sekitar 60-90 hari.
3. Piutang lain-lain, mencakup semua jenis tagihan yang bukan termasuk kedalam piutang usaha. piutang ini timbul dari pemberian pinjaman kepada orang lain, pinjaman kepada karyawan dan lain sebagainya.

### **Sistem Akutansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah seluruh aset perusahaan atau organisasi yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis yang lebih dari satu tahun dan diperoleh untuk melaksanakan kegiatan perusahaan atau organisasi, bukan untuk dijual kembali. Dalam neraca pos aset tetap berdampingan dengan aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan

dan aset lainnya. Menurut Mulyadi, (2018: 497) karakteristik transaksi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Frekuensi terjadinya transaksi yang dapat mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah besar.
2. Pengendalian aset tetap akan dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap dapat diterapkan dalam perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap.
3. Pengeluaran yang terkait dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) dan pengeluaran modal (*capital expenditure*).

Aset tetap dilakukan pengendalian karena pada saat perencanaan perolehannya, sistem akuntansi aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi (kekuasaan) sejak perencanaan sampai pelaksanaan perolehan aset tetap. Menurut Mardjani et al.,(2015: ) Jenis aset tetap dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Aset tetap tidak dapat disusutkan  
Aset tetap yang tidak dapat disusutkan merupakan aset yang memiliki umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya, tanah untuk bangunan kantor. Harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas.
2. Aset Tetap Dapat Disusutkan  
Aset tetap yang dapat disusutkan merupakan aset yang memiliki umur atau masa manfaatnya

terbatas. Jenis dari aset yang dapat disusutkan yaitu :

- i. Aset tetap yang memiliki masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan, misalnya : bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor dan lain sebagainya.
- ii. Aset tetap yang bila pada masa manfaatnya telah berakhir tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkannya (depleksi). Misalnya : tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya, biaya peralatan, gedung dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban selama umur manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban disebut dengan penyusutan atau depresiasi (depreciation). Oleh karena itu, tanah memiliki kemampuan yang tidak terbatas, jadi tanah tidak terdepresiasi. Menurut Jusuf, (2017: 491) depresiasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau fungsional, yaitu :

1. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca.
2. Penyusutan fungsional terjadi pada saat aset tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Misalnya,

peralatan dapat menjadi kuno akibat perubahan teknologi.

Penyusutan merupakan masalah sangat penting dalam masa pemanfaatan aset tetap. Menurut (Mairuhu & Tinangon, 2014) menyatakan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung beban penyusutan adalah :

1. Biaya perolehan (*Initial cost/capitalized cost*), adalah jumlah keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi bisnis untuk memperoleh suatu aset tetap.
2. Umur manfaat (*usefull life*) merupakan estimasi atau perkiraan lamanya masa (waktu) penggunaan aset tetap.
3. Nilai sisa/residu (*residual value/scrap value/salvage value/trade in value*) merupakan estimasi nilai turun aset tetap yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
4. Jumlah biaya yang dapat disusutkan (*asset't depreciable cost*) yaitu selisih antara biaya perolehan aset tetap dengan nilai residunya.
5. Jumlah tercatat/nilai buku (*book value*) yaitu hasil selisih antara biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan.

Penyusutan dilakukan ketika memiliki barang atau aset tetap yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Menghitung penyusutan harus memperhatikan hal-hal yang diperlukan agar menunjukkan nilai yang sesungguhnya.

### **SAK ETAP**

SAK ETAP adalah suatu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar ini



digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga perusahaan atau organisasi menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sudah menerbitkan SAK ETAP, dalam penyusunan laporan keuangan yang terbit pada tahun 2009. Terbitnya SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) 2009 merupakan bukti nyata dukungan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai setelah 1 Januari 2011 secara efektif. Namun, Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengeluarkan SAK ETAP revisi terbarunya yaitu SAK ETAP tahun 2013. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan dalam menyusun laporan keuangan bagi suatu entitas.

Laporan keuangan dalam (Karisma, 2016) Menurut SAK ETAP 2013 terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut IAI 2013: 12 paragraf 3.12 laporan keuangan entitas meliputi :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :
  - a. Seluruh perubahan dalam ekuitas
  - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisikan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Laporan ini memberikan informasi tambahan penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Menurut Hardani, dkk, (2020: 53) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan kondisi apa adanya, memberikan gejala-gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-populasi atau daerah tertentu. Desain juga harus memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti dengan menggunakan prinsip-prinsip metodologi yang telah ditentukan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan komparatif. Menurut Padoko, (2017) Penelitian kualitatif merupakan multi yang berfokus, melibatkan interpretasi, dan pendekatan alamiah pada materi subjek. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami peristiwa atau fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang ada. Selain itu, pendekatan penelitian dapat memberikan gambaran tentang analisis yang sangat berhubungan dan berpengaruh dengan penelitian ini.

### **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

#### **1. Data Primer**

Data primer pada penelitian diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada narasumber dan juga melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh tidak melalui media perantara melainkan sumber asli dengan wawancara yang terstruktur dengan BUMDes X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **2. Sumber Data**

Peneliti memperoleh sumber data dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. ini dengan mengumpulkan data yang telah disusun oleh BUMDes dalam bentuk yang sudah jadi seperti struktur organisasi, neraca dan laporan laba rugi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara langsung dengan pengurus BUMDes dan karyawan BUMDes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti meliputi aktivitas BUMDes, sejarah perkembangan

BUMDes, kebijakan operasional serta kebijakan di bidang akuntansi.

2. Observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara rinci mengenai penerapan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X pada Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi atau dilakukan serta bukti-bukti fisik yang ada dalam keuangan BUMDes.
3. Dokumentasi atau pengarsipan file BUMDes dengan mengumpulkan data dengan memfotocopy laporan yang dibutuhkan dalam hal-hal penelitian tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Ahmadi, (2014) berarti suatu kaidah pencarian pola-pola dalam penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya melahirkan sebuah data mentah yang tidak memiliki arti. Kaidah – kaidah tersebut yang harus dipegang teguh oleh peneliti agar menghasilkan riset yang menarik dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiringan.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai macam teori yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pencatatan Akutansi

Berdasarkan SAK ETAP akutansi untuk pendapatan muncul sebagai akibat dari transaksi kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa seperti pinjaman dalam laporan laba rugi entitas harus mengakui pendapatan ketika jasa telah diberikan. Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X berasal dari Bantuan Pemerintah kab. Indragiri Hulu, jasa pinjaman dan bunga bank yang diakui pada saat pembayaran piutang anggota kepada pengelola BUMDes X.

Sistem pencatatan yang diterapkan oleh pihak pengelola BUMDes X yaitu sistem pencatatan yan berbasis akrual (*accrual basis*). Sistem ini merupakan proses pencatatan yang mengakui transaksi dan peristiwa telah terjadi.

### Proses Akutansi Tahap Pencatatan

Proses akutansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X yang dilakukan pertama adalah mulai mengumpulkan dan menganalisis semua bukti transaksi-transaksi seperti kwitansi. Setelah itu, pihak pengelola akan mencatat transaksi

tersebut kedalam buku kas umum dan buku kas manual SP, sedangkan transaksi yang tidak tunai akan dicatat kedalam buku memorial.

Berdasarkan hasil catatan pengelola akan merekap semua daftar uang masuk dan daftar uang keluar. Selanjutnya pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X akan menyusun neraca. Pihak BUMDes akan menyusun laporan laba rugi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X tidak membuat jurnal, buku besar, buku pembantu dan jurnal penyesuaian.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan proses akutansi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X belum sesuai dengan prinsip akutansi yang berterima umum sebab BUMDes tidak membuat jurnal, buku besar, buku pembantu, dan jurnal penyesuaian.

Seharusnya pada pencatatan akutansi berawal dari mencatat bukti transaksi berupa kwitansi lalu melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Berikut format kas harian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) X :

**Tabel 4.1**  
**Kas Harian Bulan Desember 2019**

Tanggal	Keterangan	Bukti	NP	Masuk	Keluar	Saldo
15/12/2019	Angsuran pokok 8 Hamidin	M-01	13	400.000		<b>20.326.000</b>
	Bunga 8		41	36.000		<b>20.362.000</b>
	Angsuran pokok 7-9 Suhaimi	M-02	13	1.752.000		<b>22.114.000</b>
	Bunga 7-9		41	378.000		<b>22.492.000</b>
	Angsuran pokok 4 Inur	M-03	13	278.000		<b>22.770.000</b>
	Bunga 4		41	45.000		<b>22.815.000</b>

*Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X...*  
**Dian Saputra**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Bukti</b>	<b>NP</b>	<b>Masuk</b>	<b>Keluar</b>	<b>Saldo</b>
	Angsuran pokok 1112 Zauyah	M-04	13	668.000		<b>23.483.000</b>
	Bunga 11-12		41	108.000		<b>23.591.000</b>
	Angsuran pokok 4 Deni sugandi	M-05	13	278.000		<b>23.869.000</b>
	Bunga 4		41	45.000		<b>23.914.000</b>
	Angsuran pokok 12 Romai	M-06	13	278.000		<b>24.192.000</b>
	Bunga 12		41	45.000		<b>24.237.000</b>
	Angsuran baju PKK	M-07	41	1.250.000		<b>25.487.000</b>
	Angsuran pokok 18 Nurafizah	M-08	13	417.000		<b>25.904.000</b>
	Bunga 18		41	90.000		<b>25.994.000</b>
	Angsuran pokok 2 Siti aminah	M-09	13	300.000		<b>26.294.000</b>
	Bunga 2		41	27.000		<b>26.321.000</b>
	By. Insentif komisaris bln okt s/d des 2019	K-01	54		75.175	<b>26.245.825</b>
	By. Insentif Pengawas bln okt s/d des 2019	K-02	54		105.245	<b>26.140.580</b>
	By. Insentif Direktur bln okts/d des 2019	K-03	54		173.396	<b>25.967.184</b>
	By. Insentif Asst Keuangan bln okt s/d des 2019	K-04	54		163.676	<b>25.803.508</b>
	By. Insentif Asst Adm bln okt s/d des 2019	K-05	54		158.716	<b>25.644.792</b>
	By. Insentif Kepala Unit bln okt s/d des 2019	K-06	51		289.424	<b>25.355.368</b>

Tanggal	Keterangan	Bukti	NP	Masuk	Keluar	Saldo
	By. Insentif Staf Ku bln okt s/d des 2019	K-07	51		272.885	<b>25.082.483</b>
	By. Insentif Staf Adm bln okt s/d des 2019	K-08	51		264.616	<b>24.817.867</b>
	By. Op bln okt s/d des 2019	K-09	52		300.700	<b>24.517.167</b>
<b>Jumlah</b>				<b>22.300.000</b>	<b>4.603.833</b>	<b>11.717.167</b>

Sumber : BUMDes X

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pihak BUMDes X mencatat pengeluaran dan pemasukan menggunakan pencatatan *single entry*. Pihak BUMDes tidak melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Sebaiknya BUMDes X membuat jurnal khusus untuk mengelompokkan dan mengontrol setiap transaksi yang terjadi agar dapat diketahui apabila terjadi kesalahan akan mudah mencari letak dan asal kesalahan tersebut dan mempermudah proses posting ke buku besar.

### 1. Tahap Pengklasifikasian

Tahap ini pengklasifikasian memposting ke buku besar. Memposting daftar transaksi yang akan dikelompokkan ke masing-masing akun atau perkiraan. Proses pengelompokkan ini disebut juga dengan posting.

Pencatatan ini berawal dari bukti transaksi berupa kwitansi kemudian dijurnal. Dari jurnal akan diposting ke dalam buku besar. Buku besar bertujuan mengumpulkan akun-akun yang akan digunakan untuk menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Pihak BUMDes X belum melakukan posting ke buku besar. Sebaiknya pihak pengelola melakukan posting ke buku besar agar transaksi yang terjadi sesuai dengan akun masing-masing. Sebelum memposting ke buku besar, sebaiknya membuat daftar akun dan kode akun. Setelah

membuat daftar akun, tahap selanjutnya membuat buku besar dengan urutan kode akun. Total yang telah dibuat dijurnal khusus dapat diposting ke dalam buku besar. Dibawah ini contoh buku besar yang sebaiknya dibuat oleh pihak BUMDes X.

### 2. Tahap Pengiktisaran

Setelah mengelompokkan ke dalam buku besar, maka tahap selanjutnya menyusun neraca sebelum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan berfungsi untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dan saldo kredit dari akun yang terdapat dibuku besar. Penyusunan neraca saldo sebelum disesuaikan sangat penting, jika tidak membuat neraca saldo tersebut maka saldo pada BUMDes X akan sulit mengetahui ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang akan berguna untuk menyiapkan laporan keuangan dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak BUMDes X.

### 3. Tahap penyesuaian

Pada BUMDes X belum mencerminkan kondisi Prinsip Akutansi Berterima Umum yang sebenarnya sehingga harus ada penyesuaian. Setiap kali ada pemakaian perlengkapan harus membuat penyesuaian agar nilai saldo dapat memberikan gambaran yang efisien.

Pada BUMDes X juga tidak membuat ayat jurnal penyesuaiannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pihak BUMDes menyajikan piutang usaha sesuai jumlah nominal pinjaman nasabah seperti yang tercantum dalam SP2K (Surat Perjanjian Pemberian Kredit).

- a. Jurnal penyisihan piutang tak tertagih. Pada piutang BUMDes X tidak melakukan penyajian pada akun penyisihan piutang tak tertagih. Peminjaman yang telah dilakukan dan dibayar terlambat atau sudah jatuh tempo seharusnya melakukan pencatatan piutang tak tertagih. Sebaiknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X membuat akun jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih.. Berdasarkan data yang telah penulis sajikan sebelumnya bahwa jumlah bruto piutang usaha BUMDes X pada tahun 2019

sebesar Rp 348.272.000 dari jumlah bruto tersebut seharusnya dibuat penyisihan piutang tak tertagih untuk mengantisipasi kemungkinan piutang yang tidak dibayar oleh nasabah. Penulis akan menyajikan cara membuat penyisihan piutang tak tertagih bagi pihak BUMDes dengan asumsi bahwa pihak BUMDes menentukan piutang tak tertagih berdasarkan persentase dengan menggunakan analisis umur piutang. Persentase asumsi adalah belum jatuh tempo sebesar 3%, 1-30 hari sebesar 5%, 31-60 hari sebesar 8%, 61-90 hari sebesar 12%, 91-180 hari sebesar 15% dan lebih dari 180 hari sebesar 20%. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih secara keseluruhan pada periode 2019 dihitung sebagai berikut:

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu :

Belum jatuh tempo	= 3% x Rp 221.247.000	= Rp 6.637.410
1-30 hari	= 5% x Rp 7.238.000	= Rp 361.900
31-60 hari	= 8% x Rp 14.699.000	= Rp 1.175.920
61-90 hari	= 12% x Rp -	= Rp -
91-180 hari	= 15% x Rp -	= Rp -
<180 hari	= 20% x Rp 105.088.000	= Rp 21.017.600
		= Rp 29.192.830

Maka jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih menurut penulis sebagai berikut:

Beban piutang tak tertagih	Rp 29.192.830
Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 29.192.830

Penyajian piutang usaha dineraca yang seharusnya dibuat oleh pihak BUMDes X berdasarkan asumsi perhitungan diatas sebagai berikut :

Piutang Usaha	Rp 348.272.000
Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 29.192.830
	Rp 319.079.170

Berdasarkan tabel diatas penulis menyajikan penyisihan piutang tak tertagih pada tahun 2019 yang dimana setiap peminjaman sudah diestimasikan sebesar dari saldo piutang usaha. Penyisihan piutang yang tertagih pada periode 2019 sebesar Rp 29.192.830 dan piutang bersihnya sebesar Rp 319.079.179

- b. Jurnal penyusutan aset tetap.  
Penyusutan aset tetap adalah untuk

menyusutkan suatu barang inventaris untuk menilai umur ekonomisnya tersebut. Berikut adalah contoh perhitungan penyusutan aset tetap pada salah satu kekayaan milik BUMDes X pada tanggal 01 januari 2017 dibeli laptop dengan secara tunai sebesar Rp 5.000.000 Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa laptop :

Peralatan - laptop Rp 5.000.000

Kas	Rp 5.000.000
Penyusutan pertahun	= Rp 5.000.000 : 4 Tahun
	= Rp 1.250.000

Untuk metode yang biasanya dilakukan dalam BUMDes X menggunakan metode garis lurus. BUMDes X belum melakukan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya pertahunnya adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan	Rp 1.250.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp 1.250.000

Pihak BUMDes sebaiknya membuat penyusutan atas aset tetap yang dimiliki agar dapat mengetahui nilai sesungguhnya. Dalam membuat penyusutan aset tetap harus memperhatikan pengelompokannya karena tidak semua dapat disusutkan dan memiliki kriteria dalam menyusutkan. Barang seperti heker, kalkulator, buku kas, sapu dan pel termasuk ke dalam perlengkapan karena masa pakainya dapat habis dalam satu periode. Aktiva yang sudah tidak dapat digunakan lagi tetapi masih memiliki nilai sisa atau masih dapat digunakan dalam periode berikutnya, maka aktiva tersebut bisa dijual atau dapat dicatat sebesar 1. Total keseluruhan aset tetap dicatat berdasarkan nilai buku sebesar Rp81.425.001.

## **Penyajian laporan Keuangan**

### **1. Laporan Laba Rugi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X telah membuat laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari unit usaha simpan pinjam dengan total pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 39.530.316 dan pada tahun 2018 Rp 54.530.316 (lampiran 2). Beban yang dilaporkan BUMDes X dalam laporan laba rugi terdiri operasional dan biaya-biaya lain dengan total sebesar laba rugi pada tahun 2018 sebesar Rp 12.010.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 9.480.000 (lampiran 2). Namun, laporan laba rugi yang yang dibuat pihak BUMDes X belum lengkap karena tidak

memasukkan nilai beban piutang tak tertagih dan beban penyusutan peralatan kantor.

Penulisan pendapatan provisi/lain terdapat kesalahan pencatatan dalam laporan laba rugi yang sudah dibuat. Jumlah jasa pinjaman tidak ada perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Jumlah tersebut kebetulan sama dengan tahun sebelumnya. Sebaiknya pihak pengelola lebih memperhatikan dan teliti lagi dalam melakukan pencatatan agar dapat menghasilkan laporan yang akurat. Sebaiknya pihak BUMDes X menghitung laba rugi dengan benar agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam membuat laporan laba rugi dapat membuat laba terlalu tinggi yang akan berdampak pada laporan posisi keuangan (neraca).

Penerapan metode pengakuan pendapatan dan beban yang terjadi pada BUMDes X dengan menggunakan metode *accrual basis*. Penerapan pengakuan atas pendapatan dan beban yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah sesuai dengan SAK. Dimana pendapatan dan beban dicatat setelah kas diterima dan dikeluarkan.

## **2. Laporan Perubahan Ekuitas**

Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X belum menyajikan perubahan ekuitas pada umumnya. Tujuan pembuatan laporan perubahan modal adalah untuk melihat laba rugi yang dihasilkan selama tahun berjalan dan pendapatan yang belum diakui secara langsung.

## **3. Laporan Posisi Keuangan**

Tahap penyusunan laporan keuangan keuangan yang biasanya dibuat akhir periode. Tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo. Format laporan keuangan keuangan terdapat kolom

seperti no akun, keterangan, saldo debit dan kredit. Hal tersebut akan dapat dilihat pada buku besar dan nantinya saldo akhir disajikan kedalam laporan keuangan.

Pada laporan neraca BUMDes X sudah terdapat laporan aktiva lancar yang terdiri dari akun kas, bank, piutang unit simpan pinjam dan aktiva tetap. Pada laporan hutang terdiri atas simpanan pokok dan utang nasabah lama. Metode pembayaran hutang dilakukan dengan penyetoran tunai.

Pada laporan modal BUMDes X juga terdiri dari modal lama, modal dari laba dan bantuan bergulir pemerintah desa. Didalam pendapatan akun unit usaha simpan pinjam yang didalamnya terdiri dari jasa unit simpan pinjam, denda dan provinsi. Pada neraca Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X menyajikan aktiva dan passiva. BUMDes X memisahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Pihak BUMDes X sebaiknya mencatat semua transaksi yang terjadi. Membuat laporan keuangan (neraca) haruslah baik dan benar agar memberikan informasi yang akurat.

## **4. Laporan Arus Kas**

Tujuan pembuatan laporan arus kas adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran terhadap kas dalam suatu periode berjalan. Pihak BUMDes belum menyajikan laporan arus kas. Berdasarkan hal tersebut pihak BUMDes X belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

## **5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sebagaimana yang dapat diketahui catatan atas laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui informasi yang akan diberikan kepada pihak internal maupun eksternal yang terkait. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang



terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan karena catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rincian jumlah yang memenuhi kriteria pengakuan dan laporan seperti biaya yang ditanggihkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka pihak BUMDes X belum menyajikan yang berarti belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab selanjutnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X tidak membuat jurnal, buku besar dan jurnal penyesuaian.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X dalam akun piutang tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih.
3. Dalam melakukan perhitungan terhadap aset tetap BUMDes X belum memperhatikan perolehan aset tetap dan menghitung penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki.
4. Dalam penyajian laporan keuangan BUMDes X hanya membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
5. Penerapan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X secara keseluruhan belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
6. Penulis menyadari bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X masih kekurangan tenaga ahli dalam bidang akuntansi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X membuat jurnal, buku besar dan jurnal penyesuaian.
2. Dalam menyajikan piutang, sebaiknya pihak BUMDes X menyajikan akun piutang tak tertagih agar dapat mengetahui seberapa besar nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan dan pihak BUMDes dapat mengetahui seberapa kerugian yang diakibatkan oleh piutang jika piutang tidak dapat tertagih.
3. Sebaiknya BUMDes X memperhatikan pengelompokan aset tetap karena tidak semua barang termasuk kedalamnya. Pihak pengelola juga sebaiknya menghitung penyusutan terhadap kekayaan (aset tetap) yang dimiliki agar mengetahui nilai yang sesungguhnya.
4. Sebaiknya BUMDes X menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
5. BUMDes X sebaiknya menerapkan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan prinsip akuntansi yang berterima umum.
6. Sebaiknya pihak BUMDes X mengadakan pelatihan terhadap tenaga kerja dalam membuat laporan keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.

- Bahri, Syaiful. (2016). *pengantar akuntansi* Edisi 4. CV. Andi Offset.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah Edisi 4*. Salemba Empat.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Henggara, Agie. (2019). *Pengantar Akuntansi*. CV.Jakad Publishing.
- Karisma, B. dyah. (2016). *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Peyajian Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*.
- Kawatu, freddy S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish.
- Mairuhu, S., & Tinangon, J. (2014). Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 404–412. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i4.6344>
- Mardjani, A. C., Kalangi, L., & Lambey, R. (2015). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan keuangan Pada PT. Utama Karya Manado. *Emba*,3(1),1024–1033. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7807>
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi Edisi*. Jakarta: Salemba empat.
- Padoko, Susilo (2017). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora dan Budaya*. UNY Press.
- Riswan, R., & Kesuma, Y. F. (2014). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1). <https://doi.org/10.36448/jak.v5i1.449>
- Sululing, Siswadi. (2018). *akuntansi desa teori dan praktek*. CV IRDH.
- Warren, Carls S. James M. Reeve, Jonathan E. Duchas, Ersa Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf. (2017). *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zamzami, Faiz dan Nabella Duta Nusa. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Gajah Madah University Press.
- Ikatan Akuntansi Indonesia . (2013). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Graha Akuntan